

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

### b. Buku

Abdul Hakim, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.

Andi Rio Indris Padjalangi, 2006, *Perlindungan Hukum Notaris*, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga.

Cst Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Habib Adji, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, “Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)”, disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *aspek pertanggungjawabannotaris*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Binallmu, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.

Sudikno Mertokusumodan Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012.

d. Internet

Syafran Syofyan, Notaris-PPAT-Pejabat Lelang di Jakarta Selatan, Majelis Pengawas Daerah, Dosen Lemhannas RI, Magister Kenotariatan, Pasca/S2 Hukum, Bareskrim Mabes Polri, Mabes TNI, Kemhan, Diklat Perbankan, Saksi Ahli,

<http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/>.

Irma Devita, AkibatPutusan MK TerhadapHak Istimewa Notaris, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>.

<https://media.neliti.com/media/publication/118683-ID-perlindungan-hukum-bagi-notaris>.

<http://yoanbudyanto.blogspot.co.id/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html>,

Yance Arizona, *ApaItuKepastianHukum*, lihatdalam: *ApaItuKepastianHukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>



